

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Rohman Taufiq, *Buku Ajar Kepailitan Badan Usaha Berdasarkan Paradigma Akuntansi Kepailitan* (Madiun: UNIPMA Press Universitas PGRI, 2021).
- Amad Sudiro et al., *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis* (Jawa Tengah: CV. Diva Pustaka, 2025).
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).
- M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022).
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Sistem Hukum Indonesia Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).
- Munir Fuady, *Hukum Perdata Internasional Dan Kepailitan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Bisnis Dalam Kepailitan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2020).
- Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kepailitan: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby.

Putusan Nomor 1258K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jurnal

Afifah Ansori dan Martoyo, “Mencari Tambahan Ilmu,” *Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* 2, no. 1 (2024): 137–44.

Aji Suryanata dan Yudho Taruno Muryanto, “Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kepailitan (Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.),” *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 63–72.

- Aji, K., & Sulistiyantoro, H. (2025). Asas hukum perdata sebagai dasar perlindungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Ali Murtadho and Nazhif, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen Dalam Pembersihan Proses Kepailitan', *Journal of Contemporary Law Studies*, 1.4 (2024), 207–26.
- Andani, D. (2022). Perlindungan hukum kepailitan perusahaan solvable di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 76–91.
- Antony, A. M. M. (2025). Fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Jurnal Hak: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.30656/jha.v2i2.11918>.
- Azkiya, N. M. (2026). Analisis penegakan hukum administrasi melalui perluasan keputusan tata usaha negara dalam upaya mewujudkan good governance. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 9(1), 6–14.
- Desthari Pasaning Ratna Furi, "Alasan Pemeriksaan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Judex Facti (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017)," *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 162–70.
- Dian Purnama Sari, 'Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Kreditor Beritikad Buruk', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11.3 (2022), 301.
- Fajar Sugianto, 'Rekonstruksi Asas Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20.1 (2023), 52–55.
- Fitria Amini, "Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepailit oleh Pengadilan Niaga," *Jurnal Thengkyang* 9, no. 2 (2024): 182–90.
- Fonnyta Laurenzia Rosiga dan Asharin Sindy Safirah, "Penyalahgunaan Akta Notaris dalam Skema Pailit Rekayasa," *Welfare State* 4, no. 2 (2025): 288–306.
- Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304.

- Herlina, H., Abbas, I., & Risma, A. (2022). Tanggung jawab hukum kurator atas pengelolaan dan pemberesan harta pailit. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.2776/qj.v3i2.2776-5741>.
- Himawan, A. A., Gultom, E., & Sudarjat. (2025). Analisis pengaturan dan praktik permohonan pailit diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum ditinjau menggunakan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. *CAUSA*, 14(10). <https://doi.org/10.37383/causa.v14i10.2461>.
- Iswandi, M. (2025). Pembuktian sederhana dalam proses kepailitan terhadap perusahaan pengembang pasca surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), Article 16. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss3/16>.
- Khoiruddin, M., & Kuswardani. (2023). Parameter perbuatan melawan hukum peralihan hak ganti rugi tanah dalam jual beli tanah (Studi putusan tingkat pertama 18/Pdt.G/2016/PN.Rgt sampai peninjauan kembali 681 K/Pdt/2018). *UNES Law Review*, 5(3), 1256–1265. <https://doi.org/10.31933/uneslawreview.v5i3>.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2021): 20–33.
- Marda, G., Dewangga, V., Musyaffa, R. A., & Kinanti, C. S. (2023). Pembuktian hukum acara perdata melalui pengetahuan hakim. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 8(2).
- Markuat, “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan,” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022): 80–97.
- Memem Permata Azmi, “Orisinalitas: Konsep, Penilaian, dan Cara Menunjukkannya pada Bidang Geometri,” *Juring (Journal for Research in Mathematics Learning)* 7, no. 2 (2024): 127 – 138.
- Muhammad Redha Anshari, “Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit,” *Lex Renaissance* 1, no. 1 (2019): 126–38.

- Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*.
- R Benny Riyanto, ‘Kreditor Fiktif Sebagai Bentuk Abuse of Bankruptcy Law’, *Jurnal RechtsVinding*, 10.2 (2021), 210–14.
- R Benny Riyanto, ‘Kreditor Fiktif Sebagai Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan’, *Jurnal RechtsVinding*, 10.2 (2021), 212–15.
- Rahman, L. A., Aprily, J. N., Fadhlurrahman, M. F., Nurul, Komalasari, R., & Putera, M. L. S. (2024). Sistem pengawasan dan perlindungan hukum dalam tata kelola administrasi negara. *Presidial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4), 306–312. <https://doi.org/10.62383/presidial.v1i4.104>.
- Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia,” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57–65.
- Sina, G. I., Pasha, Y. A. I., & Puteri, B. (2025). Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pemegang obligasi tanpa jaminan dalam kepailitan emiten di pasar modal. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.753>.
- Urbanisasi, & Wianti, V. K. (2025). Analisis keadilan prosedural dalam proses litigasi perdata di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 4311–4320.
- Yerika, “Keabsahan Permohonan Kepailitan Yang Diajukan Debitor Beritikad Tidak Baik (Studi Kasus Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby),” *Jurnal Hukum Staatsrechts* 5, no. 1 (2022): 1–21.

Berita

- Abdi, N. (2020, 10 Oktober). Kasus Hotel Bahtera: Uang pinjaman Rp7 miliar diserahkan secara tunai. Antara News. <https://kaltim.antaranews.com/berita/87641/kasus-hotel-bahtera-uang-pinjaman-rp7-miliar-diserahkan-secara-tunai>.

- Aprianto. (2025, 4 Februari). Marak mafia hukum kepailitan, oknum advokat dilaporkan ke Bareskrim Polri. Radar Balikpapan. <https://radarbalikpapan.com/marak-mafia-hukum-kepailitan-oknum-advokat-dilaporkan-ke-bareskrim-polri/>.
- Fazli, A. Z. (2024, 25 Februari). Hitakara heran tak punya utang tapi dipailitkan. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/654351/hitakara-heran-tak-punya-utang-tapi-dipailitkan>.
- Ibnu Huzair, “PT Hitakara Tak Punya Utang tapi Dipailitkan, Ada Apa dengan Proses Kepailitan Saat Ini,” 2024, https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/02/25/pt-hitakara-tak-punya-utang-tapi-dipailitkan-ada-apa-dengan-proses-kepailitan-saat-ini/#google_vignette.
- Masduki, A. (2023, 1 Desember). Diputus pailit padahal gak punya hutang, PT Hitakara adukan majelis hakim PN Niaga Surabaya ke MA. iNews Surabaya. <https://surabaya.inews.id/read/377188/diputus-pailit-padahal-gak-punya-hutang-pt-hitakara-adukan-majelis-hakim-pn-niaga-surabaya-ke-ma>.
- Syarif, M. (2023, 13 Juli). Persekongkolan curang PKPU Hitakara, KY dukung kuasa hukum lapor polisi. Neraca.co.id. <https://www.neraca.co.id/article/182781/persekongkolan-curang-pkpu-hitakara-ky-dukung-kuasa-hukum-lapor-polisi>.
- Yusuf Wibisono, “PN Surabaya Pailitkan Hotel Bahtera, Dirut Polisikan Kreditor Fiktif,” 2020.

LAMPIRAN

- a) Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby;
- b) Putusan Nomor 1258K/Pdt.Sus-Pailit/2023;
- c) Putusan Nomor 24 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024;
- d) Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.